



Tantangan Dan Prospek Indonesia Dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif Meneliti Pengetahuan Mahasiswa Upn “Veteran” Jakarta”

Maulvina Shanti Levianita¹, Muhammad Hanif Arkan², Nesia Putri Lopian³, Ni Ketut Rania Paramita Swastika⁴, Veronica Sekar Wela Lagut⁵, Fahri Indiyartono⁶, Davina Syakirah⁷, Ali Thahir⁸, Frisca Adelia Stevani⁹, Riovaldi Paruntung Silalahi¹⁰, Subakdi¹¹

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

Received:
Revised:
Accepted:

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta terhadap politik luar negeri bebas aktif Indonesia, dengan fokus khusus pada peran aktivisme generasi muda, tantangan dari isu global, fleksibilitas dalam adaptasi, potensi politik luar negeri sebagai alat mengatasi ketidakpuasan politik, serta pengaruh Indonesia di organisasi internasional. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara berbasis Grounded Theory Design, penelitian ini mencari tahu bagaimana politik luar negeri bebas aktif mampu mendukung tujuan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (85%) setuju bahwa politik bebas aktif memungkinkan generasi muda untuk lebih terlibat dalam proses politik dan mendorong inovasi serta pemikiran kritis. Mayoritas juga menyatakan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika politik global, dengan 70% setuju dan 22,5% netral terhadap pernyataan ini. Selain itu, terdapat kesepakatan kuat bahwa politik ini memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas regional serta berperan penting dalam diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional. Adapun tantangan yang dihadapi berasal dari isu global seperti perubahan iklim dan terorisme, di mana 67,5% responden menganggap ini sebagai hambatan utama. Namun, politik luar negeri ini juga dilihat sebagai potensial dalam meningkatkan pengaruh Indonesia di organisasi internasional, dengan 72,5% responden menyatakan setuju. Terakhir, penelitian mengungkap bahwa pengetahuan dan pendidikan mengenai politik luar negeri bebas aktif perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat, dengan 90% responden setuju akan hal ini. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan prospek positif politik luar negeri bebas aktif Indonesia tetapi juga menggarisbawahi tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan perannya dalam mencapai tujuan nasional dan meningkatkan keterlibatan serta pengaruh Indonesia di kancah internasional.

Keywords: *Politik luar negeri bebas aktif, diplomasi, kepentingan nasional, kerjasama internasional.*

(*) Corresponding Author:

2310611326@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,
2310611327@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611360@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
231061330@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2310611107@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵,
2310611446@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶,
2310611094@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷,
2310611472@mahasiswa.upnvj.ac.id⁸,
2310611081@mahasiswa.upnvj.ac.id⁹,
2310611082@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁰, subakdi@upnvj.ac.id¹¹

How to Cite: XXXXXX. (2018). XXXX. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, XX (x): x-xx.

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam hubungannya dengan dunia internasional. Indonesia melakukan politik bebas aktif daripada politik netral, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengambil sikap dan kebijaksanaan mereka terhadap masalah internasional tanpa terikat pada blok tertentu (Sari, 2023).

Gagasan politik luar negeri yang bebas dan dinamis muncul pada awal kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945, kebebasan bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara lain dikenal dengan "merdeka." Artikel ini menguraikan konsep politik luar negeri bebas aktif inidan menelusuri perkembangan politik luar negeri Indonesia setelah reformasi. Reorganisasi Kementerian Luar Negeri menghasilkan organisasi yang lebih transparan dan mudah diakses, menandai era transformasi (Sugiarto et al., 2023).

Konsep ini bertujuan untuk mendukung perdamaian dunia dan memberi Indonesia kebebasan untuk memilih bagaimana menangani konflik internasional. Selama era Joko Widodo, Indonesia terus mengupayakan kebijakan politik luar negerinya, melakukan politik luar negeri bebas dan aktif untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan negara. Negara Indonesia menghadapi tantangan seperti panjangnya 5,200 km dengan kurang lebih 17,000 pulau, perbatasandengan negara lain, dan era globalisasi yang memiliki efek baik dan buruk, sebagai acuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat membuat Indonesia tercemar oleh ancaman dari luar dan dalam negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru akan kami bahas dalam project kali ini, yaitu yang berjudul "Tantangan dan Prospek Indonesia Dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif Meneliti Pengetahuan Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta". Adanya pembahasan tentang topik ini karena diharapkan bahwa masyarakat Indonesia bisa lebih bijak untuk memilih serta memilih apa yang bisa menjadi ancaman bagi negara dan segala macam hal lainnya.

Peran Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif dapat kita tekankan dan fokuskan karena Indonesia mempunyai sejarah panjang dalam mengembangkan prinsip "bebas-aktif" dalam politik luar negerinya. Pada masa

pemerintahan Joko Widodo, asas ini tetap menjadi pedoman dalam merumuskan politik luar negeri Indonesia, dengan tujuan utama menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia kepada

masyarakat internasional dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam banyak organisasi internasional seperti ASEAN, berperan sebagai pionir dalam organisasi pendiri seperti Gerakan Non-Blok, dan juga menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Non-Blok. Gerakan Asosiasi di Jakarta pada tahun 1992. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam berbagai bentuk kerja sama internasional seperti kerja sama politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan, serta menjadi anggota organisasi internasional. seperti APEC dan OKI. Oleh karena itu, peran Indonesia dalam kebijakan luar negeri yang liberal dan aktif sangat penting dalam menghadapi tantangan global dan melindungi kepentingan nasionalnya. Untuk mencapai "tujuan nasional", penelitian ini menyelidiki bagaimana politik luar negeri Indonesia mengacu pada setiap kebijakan pemerintah Indonesia yang berhubungan dengan dunia internasional (Mila dkk, 2020). Peran politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian global dan menjaga hubungan dengan negara lain secara bebas dan tanpa batasan geografis atau politik. Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah untuk mencapai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia bergabung dengan organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), serta bekerja sama dengan negara lain di berbagai bidang, terutama politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan penelitian.

Secara umum, politik luar negeri adalah kumpulan sikap, nilai, dan tujuan untuk melindungi, menjamin, dan memajukan kepentingan nasional suatu negara di kancah internasional (Wargi, 2021). Tema utama topik ini adalah tentang peran Indonesia dalam politik luar negeri yang liberal dan aktif. Untuk memahami dan mendalami bagaimana Indonesia berperan aktif dalam mencapai tujuan nasional dan internasional berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan menjaga perdamaian di seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan nasional dan internasional yang luas, Indonesia harus memainkan peran yang aktif dan liberal dalam politik internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Politik Bebas Aktif

Politik luar negeri bebas aktif adalah kebijakan yang dipegang oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Dalam konteks Indonesia, politik luar negeri bebas aktif memiliki makna khusus yang tercantum dalam konstitusi dan kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan. Bebas berarti bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan atau blok kekuatan tertentu di dunia internasional, baik dalam konteks politik, militer, maupun ekonomi. Ini memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan luar negerinya tanpa tekanan atau pengaruh dari kekuatan asing tertentu (Bekareka, 2016).

Aktif berarti bahwa Indonesia secara proaktif berpartisipasi dalam upaya internasional untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Ini termasuk keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi internasional, mediasi dalam konflik, kontribusi dalam misi perdamaian, dan inisiatif diplomatik lainnya.

Definisi tersebut sejalan dengan pengertian politik luar negeri yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU 37/1999 sebagai berikut: Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

B. Tantangan Politik Bebas Aktif

Sebagai kebijakan dalam proses berdiplomasi dengan negara luar, politik bebas aktif tentu memiliki tantangannya sendiri. Secara prinsip, politik bebas aktif telah dinilai berhasil dan sesuai dengan masyarakat Indonesia, yang dibuktikan oleh keberhasilan peran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Kata “bebas” dalam politik bebas aktif telah teruji dengan kebebasan Indonesia selama ini untuk menentukan jalannya negara. Namun, kata “aktif” belum sepenuhnya terlihat dengan kurangnya keaktifan Indonesia dalam penyumbangan ide dan konsep pada kancah internasional.

Tantangan lain yang dirasakan dalam mengimplementasikan politik bebas aktif adalah pelaksanaannya yang cukup sulit. Realitanya, terdapat kesenjangan ide dan pengimplementasian dalam politik bebas aktif. Contohnya pada acara ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang diklaim oleh Marty Natalegawa sebagai mantan menteri luar negeri RI ambisius pada pembukaan, namun menjadi tempat

menggagas ide masing-masing negara pada bagian kedua.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa walaupun politik bebas aktif telah memiliki intisari yang sesuai dengan pandangan negara, perlu tinjauan lebih lanjut agar diplomasi dilakukan dan mencapai hasil yang optimal (Dwikardana dkk, 2017).

C. Prospek Politik Bebas Aktif

Bangsa Indonesia dijuluki sebagai macan asia yang tertidur karena kekayaanpotensi yang dimiliki oleh bangsa ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Prinsippolitik luar negeri bangsa Indonesia yang bebas aktif, diharapkan dapat membantu bangsa Indonesia untuk mengembangkanpotensinya hingga pada tahap mancanegara. Berikut ini adalah prospek-prospek yang dapat diraih bangsa Indonesia melalui politikluar negeri bebas aktif ini. Menurut (Susanto):

- 1) Pada bidang ekonomi, bangsaIndonesia yang terletak pada posisi strategis yang dilewati oleh jalur perdagangan dunia ini diharapkan mampu memudahkan dan meningkatkan produktivitas ekspor produk dalam negeri, bahan pangan, dan material mentah, guna mendorong produktivitas perekonomian bangsa Indonesia dan menarik minat para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
- 2) Selama beberapa tahun belakangan, bangsa Indonesia dengan aktif terlibat dalamorganisasi-organisasi internasional dan dalam beberapa kesempatan telah memangku jabatan yang krusialdalam organisasi- organisasiinternasional tersebut. Hal inidiharapkan dapat membuat bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang kuat dan stabil di mata dunia, yang dapat dimanfaatkan untukkepentingan perpolitikan dan perekonomian bangsa.
- 3) Politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif yang tidak berpihak ini juga membukakan

jalan bagi lebih banyak kerjasama-kerjasama dan pertukaran-pertukaran ilmu yang dapat bermanfaat bagi perwujudan pembangunan berkelanjutan yang tengah dijalani oleh bangsa Indonesia.

D. Definisi Kerjasama Politik Bebas Aktif : Jenis-Jenis Politik Bebas Aktif

1. Politik Luar Negeri Bebas Aktif merupakan salah satu prinsip utama yang dianut oleh Indonesia sejak kemerdekaan. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan prospek. Dalam sejarah Indonesia sendiri ada memiliki berbagai jenis dari politik bebas aktif ini sendiri. maka disini kami akan menjelaskan dan memberikan contoh terhadap Jenis-Jenis Politik Bebas Aktif menurut (Anwar,2010):
2. Politik Non-Blok: Indonesia mengedepankan prinsip tidak memihak dan tidak bergabung dengan blok militer manapun, baik Blok Barat maupun Blok Timur. Ini merupakan implementasi dari prinsip Bebas Aktif dalam konteks Perang Dingin.
3. Politik Menjunjung Perdamaian Dunia: Indonesia aktif dalam upaya-upaya menciptakan perdamaian dunia, seperti mendukung penghapusan senjata nuklir, menolak kebijakan diskriminatif, dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Politik Perjuangan Melawan Kolonialisme dan Imperialisme: Indonesia memperjuangkan Kebebasan Aktif mendukung kemerdekaan negara-negara yang masih terjajah dan menentang kolonialisme dan imperialisme. Politik Mendukung Gerakan Persatuan Asia-Afrika: Indonesia menjadi salah satu pendiri Gerakan Non-Blok dan terlibat aktif dalam memperkuat solidaritas negara-negara Asia-Afrika.

Politik Kerjasama Internasional: Indonesia aktif dalam organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mendorong kerjasama internasional dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Survey

Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara dan mengikuti *Grounded Theory Design*. Menurut (Ruswandi, 2022) Pendekatan grounded theory adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan teori dari lapangan melalui penggunaan berbagai prosedur sistematis. Dengan kata lain, gagasan pokok pendekatan Grounded Theory adalah analisis kualitatif terhadap data lapangan dilakukan dengan membaca sekumpulan

teks (catatan lapangan, transkrip wawancara, atau dokumen terkait) secara teliti (sebanyak-banyaknya). diperlukan untuk mengeksplorasi konsep atau kategori dan hubungan antara konsep dan kategori tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjalani proses eksplorasi konsep atau kategori yang muncul dari data tersebut

B. Waktu dan tempat penelitian

Lokasi penelitian kami terletak di Kampus UPN “Veteran” Jakarta Pondok Labu, yang terletak di Jl. RS. Fatmawati Raya, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini memiliki alasan yang kuat dalam konteks penelitian kami, yang merujuk pada berbagai pertimbangan. Pertama-tama, kami memilih Kampus UPN “Veteran” Jakarta Pondok Labu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mencakup ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, lingkungan akademik yang kondusif, relevansi subjek penelitian, jaringan dan kemitraan, fleksibilitas, dukungan institusional, serta keamanan dan kenyamanan.

C. Populasi dan sampel

Penelitian ini memiliki fokus yang tertuju pada Mahasiswa/i maupun dosen Kampus UPN “Veteran” Jakarta mengenai tantangan dan prospek Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif, yang dimana kemungkinan besar mengeksplorasi bagaimana Indonesia mengimplementasikan kebijakan luar negeri bebas aktifnya, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan tersebut, dan prospek atau peluang di masa depan. Hal ini mencakup analisis kebijakan, strategi diplomatik, dan dinamika internasional yang mempengaruhi posisi dan tindakan Indonesia di panggung global. Kemudian pengetahuan Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta mengenai Politik Luar Negeri Bebas Aktif, yang dimana mahasiswa kampus UPN “Veteran” Jakarta dapat berfokus pada tingkat pemahaman dan kesadaran mengenai politik luar negeri Indonesia.

D. Teknik pengumpulan

2. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian berjudul "Tantangan dan Prospek Indonesia dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif Meneliti Pengetahuan Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta." kami menggunakan berbagai metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Kami menjalankan serangkaian wawancara yang melibatkan Mahasiswa/i kampus UPN “Veteran” Jakarta dengan tujuan utama untuk mendalami dengan

lebih mendalam pemahaman terkait dengan politik luar negeri bebas aktif dengan mengeksplorasi bagaimana Indonesia mengimplementasikan kebijakan luar negeri bebas aktifnya, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan tersebut, dan prospek atau peluang dimasa depan.

2. Survei

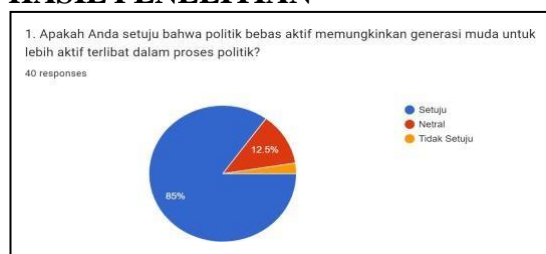
Keputusan kami untuk menggunakan kuesioner sebagai alat yang efektif dan terstruktur untuk menghimpun pandangan serta opini dari Mahasiswa/i kampus UPN “Veteran” Jakarta terkait dengan Tantangan dan Prospek Indonesia dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif, beserta dampaknya.

B. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Pada tahap ini, upaya dilakukan untuk mengelompokkan, menyamakan data yang sama, membedakan data yang berbeda, dan menyisihkan data yang serupa tetapi berbeda dari kelompok lain.

Tujuan penelitian menentukan cara pengklasifikasian dan pengelompokan data dilakukan. Fokus penelitian adalah masalah yang ingin ditangani. Octaviani dan Sutriani(2019).

HASIL PENELITIAN



Berdasarkan kuesioner yang sudah kami bagikan, kami mendapat kesimpulan dalam bentuk diagram. Dalam diagram ditunjukkan bahwa sebanyak 85% setuju bahwa politik bebas aktif memungkinkan generasi muda untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik, yang mana sebanyak 12,5% netral, dan sisanya sebanyak 2,5% tidak setuju.



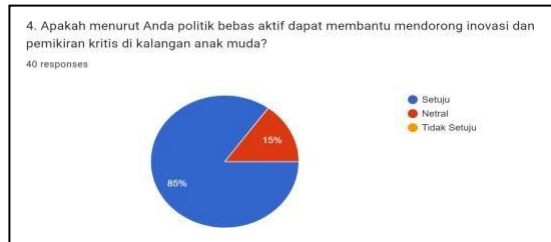
Berdasarkan kuesioner yang sudah kami bagikan, kami mendapat kesimpulan dalam bentuk diagram. Dalam diagram ditunjukkan bahwa sebanyak 67,5% setuju bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia menghadapi tantangan dari isu-isu global seperti perubahan iklim dan terorisme, yang mana sebanyak 27,5% netral, dan sisanya sebanyak 5% tidak setuju.



Berdasarkan kuesioner yang sudah kami bagikan, kami mendapat kesimpulan dalam bentuk diagram. Dalam diagram ditunjukkan bahwa sebanyak 70% setuju bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika politik global, yang mana sebanyak 22,5% netral, dan sisanya sebanyak 7,5% tidak setuju.



Berdasarkan kuesioner yang sudah kami bagikan, kami mendapat kesimpulan dalam bentuk diagram. Dalam diagram ditunjukkan bahwa sebanyak



85% setuju bahwa politik bebas aktif dapat membantu mendorong inovasi dan pemikiran kritis di kalangan anak muda, yang mana sebanyak 15% netral.



Berdasarkan kuesioner yang sudah kami bagikan, kami mendapat kesimpulan dalam bentuk diagram. Dalam diagram ditunjukkan bahwa sebanyak 60% setuju bahwa politik bebas aktif sebagai alat untuk mengatasi ketidakpuasan politik dan meningkatkan perwakilan generasi muda dalam lembaga politik, yang mana sebanyak 30% netral, dan sisanya sebanyak 10% tidak setuju.



Berdasarkan kuesioner yang sudah kami bagikan, kami mendapat kesimpulan dalam bentuk diagram. Dalam diagram ditunjukkan bahwa sebanyak 72,5% setuju bahwa Indonesia dapat

memanfaatkan politik luar negeri bebas aktif untuk meningkatkan pengaruhnya di organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB, yang mana sebanyak 27,5% netral.



Berdasarkan kuesioner yang sudah kami bagikan, kami mendapat kesimpulan dalam bentuk diagram. Dalam diagram ditunjukkan bahwa sebanyak 72,5% setuju bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas regional di Asia Tenggara, yang mana sebanyak 27,5% netral.



Berdasarkan kuesioner yang sudah kami bagikan, kami mendapat kesimpulan dalam bentuk diagram. Dalam diagram ditunjukkan bahwa sebanyak 72,5% setuju bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia berperan penting dalam diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional, yang mana sebanyak 25% netral, dan sisanya sebanyak 2,5% tidak setuju.

ditunjukkan bahwa sebanyak 62,5% setuju bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia memungkinkan negara ini untuk berperan sebagai mediator dalam konflik internasional, yang mana sebanyak 37,5% netral.



Berdasarkan kuesioner yang sudah kami bagikan, kami mendapat kesimpulan dalam bentuk diagram. Dalam diagram ditunjukkan bahwa sebanyak 90% setuju bahwa pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai politik luar negeri bebas aktif Indonesia perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, yang mana sebanyak 10% netral

PEMBAHASAN

Dalam rangkaian wawancara yang kami lakukan, setiap pertanyaan yang diajukan berniat untuk memetakan persepsi dan pemahaman tentang kemampuan diplomasi strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan global serta meningkatkan kemandirian di era globalisasi.

Wawancara ini diawali oleh Ni Ketut Rania Paramita Swastika, yang mengenalkan diri sebagai anggota Kelompok 4 Pjbl Kepemimpinan dari Kelas B, mendekati Alvina Maretia Widowati, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum angkatan 23. Tujuan utama adalah untuk menggali pemikiran Alvina tentang bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan diplomasi strategisnya untuk mempertahankan kesetaraan strategis dan independensi.

Alvina berpendapat bahwa Indonesia harus meningkatkan pengetahuan diplomatik dan kerjasama internasional dalam berbagai sektor seperti ekonomi, politik, dan budaya untuk memperkuat diplomasi strategis. Menurutnya, peningkatan ini esensial agar Indonesia dapat mempertahankan keberpihakan strategis dan kemandirian di tengah berbagai dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. Ini mencakup peningkatan keterampilan diplomatik dan kapasitas untuk berdiplomasi secara strategis, yang akan memposisikan Indonesia lebih kuat di kancah internasional.

Selanjutnya, dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan luar negeri yang erat kaitannya dengan geopolitik, Alvina menyatakan bahwa Indonesia harus meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional. Kerjasama ini dianggap vital untuk mempertahankan keberpihakan strategis sambil menjaga kemandirian.

Element penting lainnya yang dia tekankan adalah penanganan isu global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik, yang memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan multilateral.

Menyikapi pertanyaan terakhir mengenai kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan luar negeri yang berkaitan dengan geopolitik, ekonomi, dan diplomasi, Alvina kembali menegaskan pentingnya peningkatan pengetahuan dan kerja sama internasional. Dia percaya bahwa memperbanyak kapasitas negara dalam menghadapi tantangan global akan melibatkan peningkatan pemahaman dan aplikasi konsep cara berdiplomasi yang efektif serta strategis, yang mencakup dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan luar negeri yang responsif dan adaptif terhadap dinamika global saat ini.

Melalui wawancara ini, kami berhasil menangkap gambaran tentang perspektif mahasiswa terkait pendekatan yang harus diambil Indonesia untuk tidak hanya bertahan tapi juga memperkuat posisinya dipanggung internasional.

Alvin menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan tentang diplomasi sebagai kunci utama, agar Indonesia mampu menghadapi dan menavigasi kompleksitas tantangan geopolitik dan ekonomi global saat ini.

Kemudian Pertanyaan Kedua, Dalam sebuah wawancara yang dilaksanakan pada siang hari, Irena Sapitri dari Fakultas Hukum memberikan pandangannya mengenai bagaimana Indonesia dapat meningkatkan kemampuan diplomasi dan strategi diplomasi untuk mempertahankan kemandirian di era global. Menurut Irena, kunci untuk mempertahankan kemandirian

diplomasi terletak pada peningkatan kerjasama regional. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan stabilitas kawasan, tetapi juga memperkuat hubungan antar negara-negara anggota. Selain itu, Irena menekankan pentingnya menjalin hubungan persahabatan dengan lebih banyak negara agar Indonesia dapat membentuk konektivitas yang lebih luas dan tidak hanya berpihak kepada beberapa negara saja.

Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan luar negeri yang terkait dengan geopolitik, Irena menyarankan peningkatan program pendidikan terkait geopolitik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hubungan internasional. Upaya ini diharapkan akan membantu Indonesia untuk lebih aktif terlibat dalam hubungan internasional serta menjadi anggota yang berkontribusi dalam berbagai forum internasional. Pendekatan ini dianggap penting untuk mempertahankan keberpihakan strategis Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.

Pada akhirnya, untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan ekonomi, Irena berpendapat bahwa Indonesia harus meningkatkan tingkat ekspor, terutama pada sektor-sektor dimana Indonesia memiliki keunggulan seperti manufaktur dan pertanian. Selain itu, perlu ada peningkatan keterlibatan dalam organisasi internasional yang dapat memperkenalkan hasil-hasil lokal ke pasar global. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan posisi ekonomi Indonesia di kancah internasional, menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas dalam diplomasi dan strategi ekonomi global merupakan aspek kunci untuk menjaga serta memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional.

Kemudian Terakhir pertanyaan ketiga, Dalam wawancara tersebut, Stefie Yuliandra dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, menyampaikan pandangannya tentang bagaimana Indonesia dapat meningkatkan kapasitas diplomasi dan diplomasi strategis dalam mempertahankan kemandirian pada era global. Menurut Stefie, aspek pertama yang harus diperkuat adalah kerjasama baik pada tingkat regional maupun internasional. Kerjasama regional, khususnya melalui ASEAN, memberikan peluang

untuk Indonesia dalam memainkan peran kunci sebagai salah satu pemimpin, memperkuat kolaborasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Pada level internasional, hubungan dengan negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan negara-negara Eropa harus dijalankan secara seimbang, memastikan bahwa diplomasi Indonesia tidak condong secara berlebihan kepada satu pihak dan tetap menjaga kemandirian.

Menghadapi tantangan geopolitik adalah bagian kedua yang dibahas Stefie,

dimana beliau menyatakan bahwa peningkatan diplomasi ekonomi sangat vital. Cara konkret yang bisa ditempuh adalah dengan mengundang investasi asing yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif dan stabil. Selain itu, peningkatan kapasitas diplomatic melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi diplomat-diplomat Indonesia dianggap penting, untuk memperkuat kemampuan negosiasi, pemahaman geopolitik, serta keterampilan dalam diplomasi ekonomi.

Pada titik akhir pembahasan, Stefie menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi. Strategi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam tetapi juga mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru. Ini dapat dikerjakan bersamaan dengan penguatan kapasitas sektor keamanan dan adaptasi teknologi yang canggih, sekaligus melakukan investasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia diharapkan mampu memperluas jaringan perdagangan dan investasi dengan negara lain, yang pada gilirannya meningkatkan pertahanan nasional. Dialog ini menunjukkan pemikiran yang mendalam tentang bagaimana Indonesia harus mengelola dan mengoptimalkan hubungan internasional serta diplomasi strategi untuk memajukan kepentingan nasional di kancah global.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dari kuesioner yang telah dibagikan dan wawancara yang dilakukan, berikut adalah

kesimpulan yang dapat diambil mengenaipandangan terhadap politik luar negeri bebas aktif Indonesia sebagai data berikut. yaitu, Aktivisme Generasi Muda Sebanyak 85% responden setuju bahwa politik bebas aktif memungkinkan generasi muda untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik, sementara 12,5% netral, dan 2,5% tidak setuju. Selain itu, 85% responden setuju bahwa politik bebas aktif dapat membantu mendorong inovasi dan pemikiran kritis di kalangan anak muda, dengan 15% netral. Tantangan dari Isu Global Sebanyak 67,5% responden setuju bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia menghadapi tantangan dari isu-isu global seperti perubahan iklim dan terorisme, dengan 27,5% netral, dan 5% tidak setuju. Fleksibilitas Adaptasi Sebanyak 70% responden setuju bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika politik global, dengan 22,5% netral, dan 7,5% tidak setuju. Alat Mengatasi Ketidakpuasan Politik Sebanyak 60% responden setuju bahwa politik bebas aktif bisa menjadi alat untuk mengatasi ketidakpuasan politik dan meningkatkan perwakilan generasi muda dalam lembaga politik, dengan 30% netral, dan 10% tidak setuju. Pengaruh di Organisasi Internasional Sebanyak 72,5% responden setuju bahwa Indonesia dapat memanfaatkan politik luar negeri bebas aktif untuk meningkatkan pengaruhnya di organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB, dengan 27,5% netral. Stabilitas Regional Sebanyak 72,5% responden setuju bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas regional di Asia Tenggara, dengan 27,5% netral. Diplomasi Ekonomi dan Perdagangan Sebanyak 72,5% responden setuju bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia berperan penting dalam diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional, dengan 25% netral, dan 2,5% tidak setuju. Peran sebagai Mediator Sebanyak 62,5% responden setuju bahwa politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk berperan sebagai mediator dalam konflik internasional, dengan 37,5% netral. Pendidikan dan Pengetahuan Sebanyak 90% responden setuju bahwa pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai politik luar negeri bebas aktif Indonesia perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, dengan 10% netral.

Dari wawancara yang dilakukan, terlihat adanya konsensus bahwa Indonesia perlu yaitu Meningkatkan kemampuan diplomasi melalui kerja sama regional dan internasional, Menghadapi tantangan global dengan meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional, Meningkatkan kapasitas dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya untuk mempertahankan keberpihakan strategis dan kemandirian

PENGUNGKAPAN

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel ini. Penulisan artikel ini dilakukan dalam rangka memenuhi penugasan *Project Base Learning* (PJBL) pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit bagi kami untuk menyelesaikan artikel ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Subakdi, SM, MM selaku Dosen dari mata kuliah Kepemimpinan.
2. Terimakasih untuk seluruh anggota kelompok yaitu Nesia, Hanif, Pena, Rania, Frisca, Riovaldi, Veronica, Davina, Fahri dan Ali .
3. Terimakasih untuk seluruh responden dan narasumber yang telah bersedia untuk kami wawancara dalam penugasan kali ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga artikel ini bermanfaat bagi semua orang. Kami mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk membantu kami dalam menyempurnakannya.

REFERENSI

- Anwar, Dewi Fortuna. (2010). "The Habibie Presidency: Initiating a New Paradigm of Indonesia's Democratic Transition and Foreign Policy." *Indonesian Quarterly*, Vol. 38, No. 2, pp. 133-159.
- Azhari, M. T., Al Fajri Bahri, M. P., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bekarekar, W. W. S. (2016). Alasan Indonesia Dalam Melakukan Kerja Sama Dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). *Yogyakarta: Program Pascasarjana UMY*.
- Data, T. P. (2015). Instrumen Penelitian. *Kisi-Kisi Instrumen*.
- Dwikardana, S., Djelantik, S., Triwibowo, A., Valerisha, A., Martha, J., Pangestika, F. E., & Afira, M. (2017). Transformasi strategi diplomasi di era digital: Identifikasi postur diplomasi digital di Indonesia.
- Ruswandi, A. (2022). *Grounded Theory Design*
- Sari, A.M. (2023). Politik Luar Negeri Indonesia: Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Landasannya.

- Sugiarto. (2023). POLITIK LUAR NEGERIBEBAS AKTIF. PUSHTORIA. Edu
- Susanto, D. (2022). Belt Road Initiative (BRI) Dan Kerangka Kebijakan Hukum Ekonomi Indonesia. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 82-89.
- Mila, N., Vida, F., & Adi, D. P. (2020).
Sejarah Perkembangan Politik LuarNegeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. *Jurnal Pendidikan PKN(Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 73-100.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Pramesti, G. (2015). *Kupas tuntas data penelitian dengan SPSS 22*. Elex Media Komputindo.
- Wargi, S. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi Melalui Diplomasi Ekonomi Dalam Upaya Untuk Menguasai Pasar Halal Dunia. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 320-341